

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

G20 awalnya digagas sebagai forum bersama guna membahas isu-isu ekonomi dunia sekaligus sebuah sarana akomodasi kepentingan negara-negara berkembang yang selama ini kurang mendapat perhatian dan tempat dalam forum konsultasi negara-negara industri G8 yang beranggotakan Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, Jepang dan Rusia.¹ Misi awal forum ini untuk merespon krisis ekonomi yang menerpa Asia tahun 1997, juga menjalin kerjasama dan dialog konstruktif terkait stabilitas ekonomi global diantara para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota.

Secara kumulatif, negara-negara yang tergabung dalam G20 diperkirakan menguasai sekitar 90 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi dunia, 80 persen volume perdagangan dunia, dan merepresentasikan dua pertiga populasi penduduk dunia.² Singkatnya, kekuatan ekonomi negara G20 mencerminkan kekuatan pasar dan arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa terbesar di dunia.

Namun demikian, secara *de jure*, G20 bukan sebuah organisasi internasional yang memiliki legitimasi formal dan sistem administrasi yang baku seperti Bank Dunia, IMF, ADB, AfDB atau WTO. G20 tak lebih dari forum konsultasi atau kongsi

¹ Lihat di <http://id.wikipedia.org/wiki/G8>

² Lihat <http://www.gp-ansor.org/?p=13995>

informal yang diinisiasi oleh negara-negara industri maju guna menegosiasi berbagai kebijakan ekonomi global, dengan *mission sacre* menjaga stabilitas sistem kapitalisme-neoliberal yang kini praktis tengah menghadapi krisis dan paradoks dalam dirinya. Sehingga fungsi G20 direduksi secara menyeluruh dan menghilangkan fungsi historisnya hanya demi kepentingan negara-negara industri maju (kapitalisme-neoliberal).

Sepanjang perjalanan aktifitas G20 tidak ada satu pun pembahasan yang memberikan dampak positif terhadap negara-negara berkembang khususnya dalam sektor ekonomi (*economic sector*). Sejak didirikannya G20 di Berlin, Jerman, forum ini belum bisa menjadi forum yang dapat memberikan kontribusi penting dalam pemecahan persoalan perekonomian dunia. Masih banyaknya negara-negara berkembang yang tidak lepas dari krisis ekonomi mencerminkan bahwa forum ini mengalami stagnasi.

Selama tidak berjalannya fungsi yang diharapkan dari G20 memaksa negara-negara berkembang untuk mengambil sikap mendesak negara-negara G20 agar tujuan G20 berjalan sebagaimana mestinya.

Menilik pada pertemuan G20 di Pittsrburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 24-25 September 2009 lalu, dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris Gordon Brown “sebuah tatanan baru sudah tiba, dengan tatanan baru tersebut, kita memasuki era baru kerjasama internasional”.³ G20 diprediksi akan menjadi sarana

³ Lihat <http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/04/04/04224512/g-20.buka.era.baru>

memperlancar kerjasama negara-negara maju dan berkembang khususnya negara-negara yang bergabung dalam forum G20.

Steven Schrage, ekonom dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Washington, juga berkata bahwa ada kemajuan signifikan, “G8 yang terkenal dengan pernyataan-pernyataan bombastis tetapi tak bergigi” dengan meyakinkan bahwa G20 sekarang berbeda.⁴

Erdward Prasad, ekonom dari *Brooking Institution*, Washington mengatakan, selain kesepakatan, G20 tampak kompak. Negara yang terlibat dan berperan bukan saja negara maju, tetapi juga China dan lainnya.⁵

Nampaknya G20 telah diberikan peranan penting dengan diambil alihnya tugas untuk penyelesaian masalah ekonomi dan semakin berperannya negara-negara berkembang disamping negara-negara maju dalam pengambilan kebijakan di G20 yakni diperbesarnya peran negara-negara berkembang dalam badan multilateral berpengaruh seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Demikian pula dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), reformasi pada lembaga-lembaga internasional itu akan segera dilakukan melihat pertemuan IMF yang telah dilaksanakan di Turki setelah KTT G20 Pittsburgh.

Lain bagi negara berkembang seperti Indonesia lewat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Keberadaan KTT G20 ini selalu ada gunanya. Bayangkan

⁴ Kompas, *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

kalau masalah ekonomi global hanya ditangani organisasi seperti IMF, Bank Dunia, atau WTO. Jadi meski kita sadar sulitnya mengambil keputusan yang konkret, tapi KTT G20 tetap bisa menjadi harapan untuk stabilisasi ekonomi global," kata Presiden Yudhoyono kepada wartawan saat di atas pesawat kepresidenan Garuda A330-300 yang melintasi laut atlantik menuju Toronto, Kanada, Jumat siang waktu setempat.

Yudhoyono mengakui dalam setiap KTT G20 memang terjadi perdebatan yang cukup panjang mengenai berbagai persoalan ekonomi global, terutama masalah keuangan dunia. Namun dari setiap perdebatan yang muncul bermuara pada tujuan bagaimana menyelamatkan dan menjauhkan perekonomian global dari krisis yang berkepanjangan. "Saya berharap sikap egois masing-masing negara peserta KTT G20 harus dibuang jauh karena sejatinya kita harus upayakan bersama untuk mencari cara dan strategi bagaimana masing-masing negara tidak menciptakan krisis baru, karena ini akan berdampak secara global," kata Presiden Yudhoyono.

Seperti diketahui, Indonesia sebagai anggota G20 tentu mendapat manfaat dari keberadaannya, baik mewakili kepentingannya sendiri maupun negara-negara ASEAN dan negara berkembang lainnya. Indonesia baru saja bergabung menjadi anggota baru dari *Financial Stability Board* (FSB) sehingga ikut menentukan masa depan arsitektur keuangan dunia. Indonesia juga dipercaya menjadi *co-chairman* untuk *Working Group IV* bersama Prancis.

Langkah pertemuan pimpinan negara G20 November 2008, April 2009, termasuk di Pittsburgh, Pennsylvania, AS, September 2009, secara bertahap telah berhasil memulihkan kepercayaan dan mengurangi kepanikan global, sehingga

ketenangan dapat dibangun kembali. Kondisi sektor keuangan berangsur-angsur mulai pulih dan likuiditas global mulai mengalir kembali.

Kebijakan *counter cyclical* dan kucuran likuiditas menyebabkan perekonomian global juga mulai pulih. G20 telah melaksanakan komitmen dalam KTT Washington, London, Pittsburgh, yaitu melaksanakan kebijakan fiskal stimulus 2% PDB atau setara dengan US\$1,4 triliun, melakukan rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi aset bermasalah dengan biaya sebesar US\$2-2,5 triliun, penambahan *resources* IMF sebesar US\$500 miliar dan alokasi SDR untuk menambah likuiditas dunia sebesar US\$250 miliar.⁶

Terakhir, peningkatan kapital ADB 200% dan penambahan pendanaan dari Bank Pembangunan Multilateral dan Regional (Multilateral/Regional Development Bank) sebesar US\$300 miliar serta pembiayaan perdagangan (*trade financing*) sebesar US\$ 250 miliar untuk mengompensasi kemerosotan aliran modal ke negara berkembang.⁷

Negara industri maju juga tidak bisa menghindari fakta bahwa perekonomian sejumlah negara lain mampu melesat jauh. Sebut saja kesuksesan yang diraih China, India, dan Brasil. Fakta itulah yang mendorong kesadaran negara maju perlunya membentuk tatanan ekonomi baru dunia. Mereka tak ingin dininabobokkan oleh dominasi yang mereka genggam selama ini. Sejumlah komitmen pun disepakati pada KTT G20 di Pittsburgh menuju tatanan ekonomi baru itu. Misalnya, memberikan hak

⁶ Lihat <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/06/25/151598/4/2/Indonesia-Pandang-Penting-KTT-G20-untuk-Stabilkan-Ekonomi-Dunia>

⁷ Lihat <http://web.bisnis.com/kolom/2id2534.html> yang diakses pada tanggal 24 September 2009

suara kepada negara-negara berkembang dalam badan-badan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional.

Dengan kata lain, dalam tatanan ekonomi baru itu negara-negara maju ingin *sharing power* kepada negara lain. Persoalannya, apakah benar negara-negara maju mahu dengan tulus membagi kekuasaannya?

Negara-negara maju sekarang sedang mendistribusikan persoalan ke negara-negara lain. Beban akibat krisis keuangan global ingin juga ditanggung oleh negara-negara lain lewat perubahan peran G20. Kredibilitas peran baru G20 memang tidak bisa dilihat sekarang. Reformasi di tubuh lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia menjadi taruhan komitmen negara maju untuk melakukan *sharing power*.

Lebih dari itu, reformasi juga selayaknya dilakukan di organisasi-organisasi dunia yang permanen seperti PBB. Itu disebabkan ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang sangat mencolok di badan-badan dunia. Komitmen negara-negara maju itu juga perlu dibuktikan lewat peran mereka dalam kerangka perubahan iklim. Misalnya, keharusan negara maju memberikan kompensasi dana kepada negara berkembang terkait dengan pengurangan emisi karbon.

Khususnya dalam hal ini Amerika Serikat, Amerika Serikat yang dikenal dengan negara super power sejak zamannya hingga sekarang memperlihatkan kekuatan ekonomi politik yang signifikan. Mengendalikan ekonomi dunia dan memegang perekonomian negara-negara berkembang dan terbelakang memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh Amerika Serikat dalam pengambilan

kebijakan ekonomi politik internasional. Pertemuan-pertemuan internasional menjadi kuasa negara adidaya tersebut. Pertemuan negara-negara maju dan berkembang seperti G20 tampak sejak dulu hingga sekarang merupakan arena permainan politik pengambilan kebijakan yang ditentukan oleh Amerika Serikat.

Di tengah kedigdayaan Amerika di bidang ekonomi politik, tampaknya ada sebuah perubahan kekuatan ekonomi yang mulai terlihat, dikuasai dan dikendalikan oleh negara-negara di luar Amerika Serikat. Kekacauan kondisi perekonomian negara-negara maju khususnya Amerika Serikat saat ini mulai digantikan oleh maju perekonomian bangsa Cina.

Ditengah berjalannya kekuatan perekonomian Cina, Amerika memperlihatkan ketakutan akan terjadinya keruntuhan ekonomi neoliberal yang diciptakannya sendiri. Pertemuan-pertemuan untuk mengambil kebijakan dalam menciptakan keseimbangan baru dilakukan setiap waktu untuk membangun dan menstabilkan kembali kekacauan yaitu krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat. G8 yang ditransform menjadi G20 menjadi bukti bagaimana Amerika Serikat ingin menyelesaikan persoalan ekonomi tersebut dengan tanggung jawab yang tidak ingin dipegang sendiri.

Hal ini membuat ragu para analis bidang ekonomi maupun politik khususnya penulis melihat Amerika tiba-tiba memberikan perhatian dengan agenda-agenda G20 yang awal berdirinya tidak memiliki fungsi karena diambil alih oleh G8 yang beranggotakan negara-negara industri maju berwajah kapitalisme-neoliberal kelas atas. Negara-negara pelopor berkembangnya paham kapitalisme-neoliberal yang justru mempersulit negara-negara berkembang memperpulih perekonomian

negaranya. Melihat secara kuantitas negara-negara maju lebih dominan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam forum G20.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah: Apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat dalam G20?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Suatu penelitian pasti harus memiliki teori-teori atau konsep-konsep yang akan digunakan dalam membedah persoalan-persoalan yang ada. Maka seorang peneliti haruslah menguasai teori-teori maupun konsep-konsep yang nantinya akan menjadi landasan ilmiah di tengah menyusun kerangka pemikiran untuk menghasilkan analisa yang tajam. Oleh karenanya penulis menggunakan konsep hegemoni.

Konsep Hegemoni

Hegemoni adalah gagasan orisinal dalam teori sosial seorang pemikir neo-marxis dari Italia bernama Gramsci. Berjalannya hegemoni karena saat masyarakat atau negara dikuasai oleh suatu kelompok atau negara-negara dominan. *Hegemoni is to explain the control of the dominant class in contemporary capitalism. The*

*dominant class cannot maintain control simply through the use of violence or force.*⁸

Dalam pembahasan ini maka akan lebih fokus pada dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin. Menurut Gramsci kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni.

Di samping hegemoni yang dimaksudkan Gramsci dengan peran kepemimpinan intelektual dan moral (*intellectual and moral leadership*) untuk menciptakan ide-ide dominan, Gramsci juga memperlebar khasanah intelektualnya dengan menambahkan hegemoni dalam kapitalisme untuk merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh.⁹

Gramsci dalam kritiknya terhadap konsepsi kekuasaan Karl Marx mereduksi praktik dominasi pada struktur ekonomi, dia lebih jauh memandang bahwa kekuasaan diperoleh dari hegemoni ide-ide lewat konsensus. Dalam sistem kapitalisme hegemoni ide ini digunakan agar dapat membentuk opini masyarakat dan negara bahwa sistem kapitalisme dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan demikian negara tetap menggunakan sistem kapitalisme dan masyarakat menerima perubahan-perubahan yang terjadi sebagai sesuatu yang wajar dan lazim bahkan dapat menjadi perubahan yang menciptakan kemajuan.

Setelah hegemoni ide terjadi maka juga akan terjadi hegemoni struktur dimana struktur terkuatlah yang akan memegang kendali kebijakan dan dapat memainkannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini Amerika Serikat ingin

⁸ Lihat Andrew Edgar and Peter Sedgwick, *Cultural Theory The Key Concepts*, London: Routledge, 1999, Hal. 164.

⁹ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 21

melakukan hegemoni ide yaitu transformasi G8 menjadi G20 lewat hegemoni struktur negara-negara maju yang ada dalam G20.

Melihat G20, maka ide-ide sentral transformasi G8 menjadi G20 dengan lebih memberikan peran penting kepada negara-negara berkembang seperti China, India dan Indonesia menjadi menarik diteliti, bagaimana hegemoni ini akan terjadi dan neoliberalisme tetap kokoh.

D. Hipotesa

Dengan transformasi G8 menjadi G20, juga menguasai struktur-struktur internasional, Amerika Serikat memiliki kepentingan ingin mengukuhkan sistem neoliberalisme dalam ekonomi politik dunia.

E. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bentuk studi atau kajian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan metode kualitatif akan dapat diperoleh data sekunder yang ditemukan dari buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, majalah dan situs-situs internet juga sumber lain yang relevan dengan permasalahan.

F. Jangkauan Penulisan

Demi menghindari pembahasan yang terlalu luas, skripsi ini akan memfokuskan pada bahasan kepentingan Amerika Serikat terhadap G20 pasca alih-fungsi G8 terhadap G20 dalam penyelesaian persoalan ekonomi dunia.

G. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan:

- a. Memberikan sumbangan wacana bagi studi ekonomi politik dalam Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Berusaha menjelaskan secara lebih mendalam mengenai tata wacana hegemoni negara-negara maju baik hegemoni ide maupun ekonomi politik dalam dunia internasional. Khususnya kepentingan Amerika Serikat dalam forum G20.
- c. Berusaha membongkar dominasi Amerika Serikat terhadap G20 dalam mengukuhkan neoliberalisme dalam ekonomi politik global.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab dan sub bab.

Dalam Bab I penulis akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat-perangkat yang diperlukan bagi penulisan penelitian ini seperti:

- Latar belakang masalah, yang memberikan landasan gambaran masalah yang akan dipaparkan lebih lanjut.
- Kerangka Teori, sebagai sebuah alat analisa yang digunakan untuk membedah pokok permasalahan yang sedang dibahas.

Bab II lebih diarahkan pada pembahasan mengenai sejarah dan peran G20.

Bab III akan dibahas peran Amerika Serikat di dalam G20.

Bab IV lebih difokuskan tentang kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat dalam forum G20 guna memperbaiki stabilitas ekonomi dan mengukuhkan kembali kapitalisme-neoliberal dalam wacana ekonomi politik global.

Bab V merupakan kesimpulan dari pembahasan penulisan penelitian ini.

I. Kerangka Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Kerangka Teori
- D. Hipotesa
- E. Metode Penulisan
- F. Jangkauan Penulisan
- G. Tujuan Penulisan
- H. Sistematika Penulisan

BAB II: PROFIL G20

- A. Kemunculan G20
- B. Dominasi G8 dan Disfungsi G20
- C. Transformasi G8 Menjadi G20
- D. Peran G20 dalam Wacana Ekonomi Dunia

BAB III : PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM G20 PASCA KRISIS EKONOMI

- A. Krisis Amerika Tahun 2008
- B. Peran Amerika Serikat dalam G20
- C. Bilderberg Group

BAB IV : AGENDA BARU AMERIKA SERIKAT DALAM MENGUKUHKAN NEOLIBERALISME

- A. G20 Sebagai Sarana Hegemoni Amerika Serikat
- B. G20: Perebutan Kuasa Kapitalisme Global
- C. IMF dan Stabilitas Ekonomi Politik Amerika Serikat

BAB V : KESIMPULAN